

Konflik Sosial Pasca Pembangunan Sentra Pasar Ikan Bulak Kenjeran Surabaya

KONFLIK SOSIAL PASCA PEMBANGUNAN SENTRA PASAR IKAN BULAK KENJERAN SURABAYA

Wulung Danang Wijaya

Program Studi Sosiologi, Jurusan Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri
Surabaya

wulungdanwijaya@gmail.com

Ali Imron

Program Studi Sosiologi, Jurusan Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri
Surabaya

aimron8883@gmail.com

Abstrak

Pembangunan sentra pasar ikan di Bulak kenjeran adalah rencana pemerintah kota Surabaya dalam rangka penataan kota di daerah pesisir pantai kenjeran. Pimpinan pemerintah kota Surabaya yaitu Risma bermaksud untuk mensentralisasikan para pedagang yang ada di pinggiran pantai kenjeran untuk ditempatkan di sentra pasar ikan bulak. Latar belakang pemindahan pedagang tersebut karena daerah tempat berjualan para pedagang tersebut sangat kumuh dan membuat kemacetan karena banyak pedagang yang berjualan di pinggir jalan. Pedagang ikan yang totalnya berjumlah tiga puluh orang lebih pada awalnya menolak dipindah ke dalam sentra pasar ikan bulak. Penolakan tersebut karena pedagang ikan sudah merasa banyak pelanggan yang datang dan lokasi pasar ikan tersebut sangat jauh dari rumah pedagang. Hal lain yang menjadi faktor penolakan para pedagang yaitu ketakutan akan sewa biaya yang tinggi dan masyarakat tidak mengetahui dimana sentra pasar ikan tersebut berada. Adanya resistensi tersebut membuat para pedagang berkonflik dengan pemerintah melalui Satpol PP. pedagang ikan yang bersikeras untuk menetap berjualan di pinggir jalan membuat satpol PP berbuat represif. Dampak yang dirasakan pedagang akibat konflik yang terjadi yaitu banyak pelanggan yang tidak mau membeli di tempat penjualan tersebut. Hal itu mempengaruhi pendapatan para pedagang ikan sentra kenjeran.

Kata Kunci : Pembangunan, konflik

Abstract

Development centers in Bulak Kenjeran fish market is the government's plan in the framework of Surabaya city planning area Kenjeran coast. Surabaya city government leaders are Risma intends to centralize the existing traders on the seaside Kenjeran to be placed in the center of the fish market bulak. The background removal traders because the area where the merchants selling very rundown and create congestion because many merchants selling goods on the street. Fish traders in total, thirty and more people initially resisted being moved into the center of the fish market bulak. The refusal for fish traders have been feeling a lot of customers who came in and the location of the fish market is very far from home merchants. Another thing is the rejection factor that traders fear the rental costs are high and people do not know where the fish market centers are located. There was resistance tersebut make traders in conflict with the government through the municipal police. fish traders who insist on settling sell on the roadside making PP municipal police do repressive. The perceived impact traders as a result of the conflict yaitu many customers who do not want to buy at the point of sale. It affects the income of fish traders centers Kenjeran.

Keywords: Development, conflict

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan upaya negara untuk mensejahterakan hidup masyarakatnya termasuk merubah struktur secara fisik maupun nonfisik. Pembangunan dari segi fisik meliputi infrastruktur negara sedangkan aspek nonfisik dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam berbagai negara, pembangunan dapat dijadikan acuan manakala negara itu dikategorikan sebagai negara maju atau negara berkembang. Indonesia yang jumlah penduduknya mencapai angka tertinggi ketiga di dunia merupakan salah satu negara berkembang di Asia. Negara berkembang terlihat dari salah satu faktor, yaitu jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduknya, maka negara itu akan semakin berat menanggung beban mensejahterakan masyarakatnya. Masalah kepadatan penduduk masih saja menjadi masalah penting bagi pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduknya. Segala upaya pemerintah dilakukan dalam hal menekan laju pertumbuhan penduduk yang diimplementasikan dalam sebuah program kerja pemerintah. Dampak yang ditimbulkan dari padatnya penduduk adalah terjadinya kemiskinan di berbagai daerah karena negara tidak mampu mengakomodir semua masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajibannya bekerja untuk menghidupi diri dan keluarganya. Karena semakin sempitnya lahan yang diperebutkan dan tidak ada lagi pembaharuan yang dilakukan pemerintah mengenai sumber ekonomi yang bisa mereka dapat.

Oleh karena itu, pemerintah selalu menitikberatkan pembangunan pada sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pertahanan negara karena tiga hal tersebut merupakan satu komponen yang ada pada negara dan komponen tersebut dinamakan masyarakat. Masyarakat negara merupakan tanggungan pemerintah dalam mensejahterakan hidupnya. Yang paling nyata dalam memenuhi kebutuhan di bidang ekonomi adalah dengan bekerja. Pada kenyataannya, bekerja di Indonesia sangat sulit didapatkan dan dinikmati hasilnya. Kebijakan pemerintah yang mengatur tentang sektor ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan tidak selalu menguntungkan bagi masyarakat, seperti kebijakan UMK dan UMR. Sejatinya pekerjaan itu dibagi menjadi 2 (dua) sektor, yaitu formal dan informal. Pekerjaan formal yaitu pekerjaan yang diaman individu tersebut terikat oleh aturan dari penguasa dalam hal bekerja, seperti bekerja di bidang perusahaan, dosen, guru, dan buruh. Itu merupakan salah satu kerjaan yang ada di bidang formal. Namun, di bidang informal juga dapat mampu bertahan hidup dalam memenuhi kebutuhannya, dengan cara berwirausaha. Kebijakan lain pemerintah yang melihat bahwa kesehatan juga sangat mempengaruhi bagi masyarakat untuk bisa hidup dan bertahan hidup dan masih banyak aspek kesejahteraan manusia yang menjadi tugas pemerintah yang belum maksimal dalam hal memimpin negara ini.

Tidak jarang masyarakat kerap berkonflik dengan pemerintah karena pemerintah dinilai tidak mampu membuka kesempatan bagi masyarakatnya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan masyarakat miskin semakin marginal. Oleh karena itu, masyarakat miskin identik dengan memanfaatkan hasil kekayaan alam untuk menghidupi diri dan keluarganya. Contoh profesi yang digeluti masyarakat miskin adalah nelayan, petani, pedagang sayur, maupun buah. Namun, masyarakat seperti ini tetap saja selalu diikat oleh aturan pemerintah dalam hal berprofesi dan harus mematuhi norma tersebut jika tidak ingin dikenai sanksi dalam hal berdagang.

Dalam hal ini konflik yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat sipil dan swasta yang terjadi di Kenjeran adalah konflik antara masyarakat pedagang ikan asap dengan pemerintah. Konflik yang di maksud dalam hal ini mengenai pemindahan suatu kelompok masyarakat ekonomi dalam melakukan aktivitas ekonomi (berjualan ikan asap) ke suatu tempat yang lebih sentral karena selama ini mereka berjualan di bahu jalan yang sebenarnya bahu jalan tidak boleh digunakan selain untuk kepentingan pejalan kaki namun ditolak oleh warga kelompok pengasap tersebut. Sedangkan pemerintah bertekad untuk tetap melanjutkan kebijakannya karena walikota tri rismaharini sedang gencar melakukan penataan dan penghijauan kota. Oleh karena itu pemerintah kota surabaya membangun sentra pasar untuk para pedagang ikan, kerupuk olahan ikan, dan pedagan ikan asap untuk dijadikan satu di suatu tempat. Masyarakat pengasap ikan di Kenjeran menolak dipindahkan dengan alasan, antara lain:

1. Masyarakat khususnya kelompok pengasap ikan di Kenjeran sudah berdagang dalam kurun waktu lama di bahu jalan dan tidak mengganggu siapapun bahkan tidak pernah mengotori jalan;
2. Mereka sudah memiliki langganan yang tetap sehingga ketakutan mereka ketika mereka dipindahkan pelanggan yang biasa membeli ikan akan kabur;
3. Tidak adanya koordinasi dari pemkot, dinas terkait baik lurah/camat dengan kelompok-kelompok yang ada di Kenjeran; dan
4. Tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan kelompok pengasap untuk bisa melakukan pengasapan dan jumlah fasilitas yang dibangun tidak sesuai jumlah dengan kelompok pengasap yang ada.

Arena Konflik: Tiga Ruang Kekuasaan

Konflik sosial bisa berlangsung pada masyarakat *antar-ruang kekuasaan*. Terdapat tiga ruang kekuasaan yang dikenal dalam sebuah sistem sosial kemasyarakatan, yaitu “ruang kekuasaan negara”, “masyarakat sipil

atau kolektivitas-sosial”, dan “sektor swasta” (Bebbington, 1997; dan Luckham, 1998).

Dinamika konflik sosial antarruang kekuasaan akan berlangsung semakin kompleks, manakala unsur-unsur pembentuk sebuah ruang kekuasaan tidak merepresentasikan struktur sosial dengan atribut/identitas sosial yang homogen. Di ruang kekuasaan negara, termuat sejumlah konflik sosial internal baik yang bersifat latent (terselubung/terpendam) maupun manifest (mewujud-nyata). Dalam hal ini, contoh yang paling mudah terjadi adalah konflik sosial yang berlangsung dalam praktek manajemen pemerintahan akibat olah-kewenangan dalam pengendalian pembangunan yang berlangsung secara hierarkhi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Konflik sosial horisontal, juga berlangsung antar departemen sektoral di pemerintahan pusat, ataupun antara satu pemerintah kabupaten berhadapan-hadapan melawan pemerintah kabupaten lain dalam suatu kebijaksanaan tertentu.

Di ruang kekuasaan masyarakat sipil atau kolektivitas sosial, berlangsung konflik sosial yang tidak kalah intensifnya antara sesama kolektivitas sosial dalam mempertentangkan suatu obyek yang sama. Hal ini dipicu oleh cara pandang yang berbeda-beda dalam memaknai suatu persoalan. Perbedaan mazhab atau ideologi yang dianut oleh masing-masing pihak bersengketa menjadikan friksi sosial dapat berubah menjadi konflik sosial yang nyata. Beberapa contoh aras konflik ini bisa disebutkan antara lain adalah tawuran antar warga yang dipicu oleh hal-hal yang dalam⁽¹⁾ “kehidupan normal” dianggap sederhana (sepele), seperti masalah batas wilayah administratif (desa atau kabupaten) yang hendak dimekarkan sebagai konsekuensi OTDA.

Sementara itu, di ruang ini juga bisa berlangsung konflik sosial yang melibatkan perbedaan identitas sosial komunal (*ethno-communal conflict*) seperti ras, etnisitas dan religiositas. Konflik sosial yang berlangsung antara para penganut mazhab pada sebuah agama tertentu (konflik sektarian sebagaimana terjadi antara penganut “Ahmadiyah” versus

“nonAhmadiyah”) juga terjadi secara dramatis di ruang masyarakat sipil di Indonesia. Konflik sosial yang berlangsung di ruang masyarakat sipil menghasilkan dampak yang paling “beraneka warna” (karena diversenya persoalan yang dijadikan obyek konflik) dan berlangsung cukup memprihatinkan (berujung pada kematian, cedera, dan kerusakan) di Indonesia.

Sementara itu di ruang kekuasaan **swasta**, konflik sosial lebih banyak terjadi oleh karena persaingan usaha yang makin ketat. Kendati demikian, konflik sosial juga bisa dipicu oleh karena kesalahan Negara dalam mengambil kebijakan dalam “pemihakan” kepada kaum lemah. Misalnya, konflik sosial para pedagang UKM (Usaha Kecil Menengah) melawan perusahaan retail swasta multinasional yang memasuki kawasankawasan yang sesungguhnya bukan “lahan bermain” mereka. Selain itu, konflik-konflik berdarah yang berlangsung antara nelayan trawl (pukat harimau) bermodal kuat melawan nelayan atau koperasi nelayan kecil (bermodal lemah) di berbagai daerah adalah salah satu contoh klasik konflik di ruang ini

Konflik sosial bisa berlangsung di dalam setiap ruangan ataupun melibatkan agensi atau struktur antar-ruangan kekuasaan. Dengan mengikuti model konflik sosial berperspektif ruang-kekuasaan dari Bebbington (1997) sebagaimana skemanya tergambar pada Gambar 1 di atas, maka konflik sosial antar “pemangku kekuasaan” dapat berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu:

Warga masyarakat sipil atau kolektivitas sosial berhadapan melawan negara dan sebaliknya. Dalam hal konflik sosial dapat terjadi dalam bentuk protes warga masyarakat atas kebijakan publik yang diambil oleh negara/pemerintah yang dianggap tidak adil dan merugikan masyarakat secara umum. Perlawanan asosiasi pedagang kaki-lima di Surabaya melawan penggusuran oleh Pemerintah Surabaya adalah contoh klasik yang terus kontemporer.

Konflik sosial yang berlangsung antara warga masyarakat atau kolektivitas sosial melawan swasta dan sebaliknya. Contoh klasik dalam

hal ini adalah “perseteruan berdarah” yang terus berlangsung (bahkan hingga kini) antara komunitas lokal melawan perusahaan pertambangan multi-nasional di Papua. Kasus serupa juga ditemui dalam “Tragedi Pencemaran Teluk Buyat” yang memperhadapkan warga lokal yang menderita kesakitan akibat pencemaran air terus-menerus dari limbah *tailing* aktivitas penambangan emas oleh perusahaan swasta asing di Sulawesi Utara di awal dekade 2000an.

- (3) Konflik sosial yang berlangsung antara swasta berhadapan-melawan negara dan sebaliknya. Berbagai tindakan yang diambil oleh Pemerintah/Negara dalam mengawal jalannya sebuah kebijakan, biasanya memakan biaya sosial berupa konflik tipe ini secara tidak terelakkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti dan merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak (Affifuddin dan Saebani, 2009: 59). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara *holistic*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penyajian data dari penelitian ini menggunakan format deskriptif, yaitu dengan tujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena yang timbul di masyarakat, yang menjadi obyek penelitian itu, kemudian menarik kepermukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu (Burhan, 2001: 48). Penelitian ini berusaha mengetahui mengenai

kondisi sosial ekonomi kelompok pengasap ikan di Kenjeran setelah pembangunan sentra pasar ikan Bulak, Kenjeran. Penelitian ini dilakukan sentra pasar ikan Bulak, Kenjeran, Surabaya. Subyek penelitian adalah pedagang ikan asap yang dipilih dengan menggunakan teknik *purposive*.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yakni data primer dan data sekunder. Penggalan data primer dilakukan dengan cara pengamatan berperan serta dan wawancara pembicaraan informal. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data konstruksi sosial yang sesuai dengan teori Peter L. Berger, yaitu dengan melakukan identifikasi eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan sentra pasar ikan Bulak, Kenjeran tidak pernah melibatkan penduduk atau kelompok nelayan dan pengolah hasil tangkapan ikan di daerah tersebut. Secara khusus pemerintah telah memberikan pengumuman atas pembangunan sentra pasar ikan, maka dari itu para pedagang ikan dan olahan ikan tidak merasa terganggu karena ekspektasi mereka akan adanya pengalihan tempat yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Namun, kenyataannya pasca pembangunan berdiri adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan pedagang dengan bangunan yang dibentuk oleh pemerintah kota.

Peneliti menganalisis temuan data dengan mengacu pada teori yang disebutkan pada bab 2, dalam teori tersebut dikatakan bahwa konflik sosial bisa berlangsung didalam setiap ruangan ataupun melibatkan agensi atau struktur antar-ruangan kekuasaan. Hasil temuan data menyebutkan Pasar Bulak yang baru dibangun pada tahun 2010 sampai saat ini menimbulkan konflik antara pemerintah, pedagang, yang berjualan di pasar bulak dengan dipinggir jalan. Dalam hal ini konflik sosial dapat terjadi dalam bentuk protes warga masyarakat atas kebijakan publik yang diambil oleh negara/pemerintah yang dianggap tidak adil dan merugikan masyarakat secara umum.

Konflik tersebut diperparah dengan keadaan dimana pedagang ikan Bulak tidak mau menempati sentra pasar ikan karena

beberapa faktor yang menjadi alasan para pedagang ikan tersebut. Faktor tersebut antara lain, ditempat tersebut sudah banyak pelanggannya, tidak terlalu jauh dibandingkan dengan harus ke sentra pasar ikan dan ditakutkan adanya biaya yang dikenakan pemerintah kepada para pedagang ikan. Kondisi seperti itu membuat para pedagang selalu berhadapan dengan Satpol PP yang terus merazia para pedagang yang masih nekad berjualan dipinggir jalan. Jika masih ditemukan pedagang yang berjualan di pinggir jalan tersebut, maka barang dagangannya akan di sita dan bahkan ada yang di ancam dipenjara jika demikian maka pedagang akan merugi.

Dampak yang kedua adalah dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat pengasap. Karena adanya konflik pasca pembangunan sentra pasar ikan bulak menjadikan adanya dualisme antara masyarakat pengasap yang mau direlokasi dan tidak mau direlokasi. Sehingga pembeli bingung memilih dan bertanya ada apa sebenarnya yang terjadi melihat fenomena yang terjadi. Melihat sentra pasar ikan namun, yang didalamnya hanya ada beberapa pedagang yang berjualan. Sedangkan yang berjualan diluar pasar menggunakan bangunan semi permanen banyak berderet-deret namun harganya berbeda dengan yang ada di dalam pasar. Dualisme yang terjadi tidak hanya perbedaan dalam pandangan pedagang untuk memilih tempat berjualan namun juga adanya intimidasi kepada kelompok pedagang yang bersedia dipindahkan ke sentra pasar ikan bulak oleh pedagang yang menolak dipindahkan karena menilai bahwa pedagang yang mau dipindahkan adalah pedagang yang tidak memiliki rasa setia kawan.

Yang ketiga, data menunjukkan tidak adanya koordinasi antara pemerintah kota, pegawai kecamatan sampai turun ke bawah masyarakat khususnya ke kelompok pengasap ikan. Sehingga apa yang diinginkan kelompok pengasap ikan tidak dipenuhi oleh pemerintah. Pemerintah tidak pernah mengajak dialog kelompok pedagang yang berada di kenjeran. Ditambah parahnya lagi adalah adanya upaya perlindungan yang dilakukan oleh camat bulak yang mencoba memproteksi penjual yang berjualan di pinggir jalan sehingga

ketika ada sidak oleh pemkot selalu dapat dikondisikan dengan baik. Seolah-olah masyarakat sudah dapat ditertibkan.

Hal ini dapat dilihat bahwa konflik yang terjadi antara pemerintah, pedagang dan warga sipil terjadi karena memang adanya pemegang kekuasaan yang tidak dapat bertanggung jawab untuk melakukan kebijakannya sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Konflik seperti ini diakibatkan oleh elit yang berada di tengah kekuasaan namun memiliki kepentingan yang memanfaatkan masyarakat, sehingga dapat dilihat dengan adanya fenomena yang terjadi akibat pembangunan pasar ikan di bulak pada ujungnya masyarakatlah yang menjadi korban sehingga mereka saling berkonflik sendiri dengan sesama anggota kelompok masyarakat disebabkan ketidak jelihan pemerintah dalam mengakomodir kepentingan masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan yang dapat dihasilkan oleh peneliti dari fenomena kondisi sosial ekonomi dari pembangunan sentra pasar ikan bulak adalah terjadinya konflik antara warga sipil dengan pemerintah dan masyarakat. Hal ini diakibatkan tidak adanya koordinasi dari atas sampai ke bawah. Sehingga mengakibatkan keadaan yang tidak terkontrol. Dari konflik yang sedang terjadi, maka berpengaruh terhadap penghasilan pedagang akibat pembeli lebih condong membeli ikan dari pedagang yang ada di luar sentra pasar. Hingga sekarang sentra pasar ikan yang telah di bangun dan telah dibangun sesuai dengan kebutuhan pedagang, namun sebagian pedagang tidak mau masuk kedalam sentra pasar ikan.

Saran yang bisa disampaikan oleh peneliti adalah seharusnya pemerintah dalam hal ini harus melakukan kontroling kebijakan dan program yang dilakukan untuk masyarakat sehingga masyarakat yang berada ditataran bawah menjadi selaras dan terbina dan tidak terjadi konflik antar warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi dan Sukidin. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Mikro*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Pers.

- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana.
- Engkus Kuswarno. 2013. *Fenomenologi*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Polama, Maregaret. 2013. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Goodman, Douglas J, dan George Ritzer. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika
- http://www.kompasiana.com/oun.samlanh/makna-petugas-partai-dalam-konteks-bahasa-dan-undang-undang_5535affe6ea834b921da42ce// (Diakses pada 13 April 2016).
- <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/163/BAB%20II%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf> (Diakses pada : 6 April 2016).
- <http://www.pdiperjuangan.id/article/category/child/28/Partai/AD/ART> (Diakses pada : 6 April 2016).
- <http://digilib.uinsuka.ac.id/13718/1/BAB%20I.%20IV.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> (Diakses pada 10 November 2016)